

Analisa Program Murid dalam Penguatan Kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia

Student Program Analysis in Strengthening Vocational High School Student Affairs in Indonesia

Adrianus Patiung

Tim Kerja Peserta Didik Direktorat SMK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Penulis Korespondensi

Adrianus Patiung

tmr.adri.mrs.anne@gmail.com

Artikel Histori

Diajukan : 16 Noovember 2025

Revisi Akhir : 29 November 2025

Disetujui : 6 Desember 2025

Terbit : 13 Desember 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program murid dalam penguatan bidang kesiswaan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia. Fokus utama penelitian meliputi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), penguatan pendidikan karakter, implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), penyusunan roadmap akademik kesiswaan, serta pemetaan kompetensi dan bakat minat murid. Metode penelitian yang digunakan adalah ex post facto dan focus group discussion (FGD) yang melibatkan Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan dari berbagai provinsi. Hasil penelitian menunjukkan berbagai tantangan seperti keterbatasan sosialisasi, infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan keterlibatan stakeholder. Namun, berbagai praktik baik juga ditemukan, seperti pelaksanaan MPLS berbasis budaya kerja, pelibatan aktif orang tua dan alumni dalam ekstrakurikuler, serta integrasi nilai karakter dalam kegiatan harian siswa. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum Wakasek Kesiswaan nasional, pelatihan guru dalam penguatan karakter, dan penggunaan sistem digital pemantauan siswa. Temuan ini mendukung perlunya kebijakan yang lebih responsif dan kolaboratif untuk menciptakan lingkungan pendidikan vokasi yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kompetensi dan kesiapan kerja lulusan SMK..

Kata Kunci

Kesiswaan, Sekolah Menengah Kejuruan, Mpls, Pendidikan Karakter, Roadmap Kesiswaan

Abstract

This study aims to analyze the implementation of student programs to strengthen student affairs in Vocational High Schools (SMK) in Indonesia. The main focus of the study includes the implementation of the New Student Admission Selection (SPMB), the School Environment Introduction Period (MPLS), strengthening character education, the implementation of the 7 Habits of Great Indonesian Children (7KAIH), the development of a student academic roadmap, and mapping student competencies and talents. The research method used was ex post facto and focus group discussions (FGD) involving Vice Principals for Student Affairs from various provinces. The results of the study revealed various challenges such as limited socialization, infrastructure, human resource readiness, and stakeholder involvement. However, various good practices were also found, such as the implementation of a work culture-based MPLS, the active involvement of parents and alumni in extracurricular activities, and the integration of character values into students' daily activities. This study recommends the establishment of a national Vice Principals for Student Affairs forum, teacher training in character strengthening, and the use of a digital student monitoring system. These findings support the need for more responsive and collaborative policies to create a safe, inclusive, and sustainable vocational education environment, thereby improving the competency and work readiness of SMK graduates..

Keywords

Student Affairs, Vocational High School, Mpls, Character Education, Student Affairs Roadmap

1. Pendahuluan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional yang berperan dalam menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan dunia industri dan pasar kerja. SMK tidak hanya berorientasi pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga pengembangan potensi siswa agar mampu beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perkembangan teknologi yang pesat menuntut tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif agar suatu negara dapat bersaing secara global dan memanfaatkan peluang yang ada (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023). Oleh karena itu, pendidikan kejuruan harus dirancang secara terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan kejuruan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja di bidang tertentu (Republik Indonesia, 2003).

Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, dengan pendidikan vokasi sebagai instrumen utama. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan kejuruan menjadi fokus untuk mencetak tenaga kerja yang mendukung transformasi ekonomi nasional (Bappenas, 2024). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 menegaskan revitalisasi pendidikan vokasi sebagai agenda prioritas, dengan fokus pada penguatan kompetensi teknologi digital, literasi hijau, dan pengembangan kewirausahaan. Kebijakan ini mencerminkan kebutuhan akan model pendidikan vokasi yang dinamis, adaptif, dan berbasis kebutuhan pasar kerja (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan sejumlah kendala signifikan yang dihadapi SMK, seperti keterbatasan infrastruktur, kurikulum yang kurang relevan, kualitas guru yang belum merata, dan keterbatasan kerja sama dengan dunia industri. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 27% SMK memiliki *teaching factory* aktif, dan kurang dari 15% menjalin kerja sama formal dengan industri tingkat nasional maupun internasional, padahal *teaching factory* merupakan indikator penting keberhasilan *link and match* antara pendidikan dan dunia kerja (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023). Selain itu, disparitas kualitas dan akses antar daerah, terutama di wilayah tertinggal dan terpencil, masih tinggi sehingga memerlukan strategi afirmatif. Rendahnya literasi digital dan keterampilan abad 21 di kalangan lulusan SMK juga memperbesar kesenjangan kompetensi yang harus diatasi (Bappenas, 2024).

Karakteristik pendidikan kejuruan berbeda dengan pendidikan umum karena orientasi lulusan SMK adalah kesiapan kerja yang mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan teknis, dan sikap kerja. Lulusan SMK dituntut memiliki kemampuan akademik, keterampilan teknis spesifik, dan keterampilan kerja (*employability skills*) secara seimbang untuk memenuhi standar kecakapan tenaga kerja (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023). Oleh karena itu, penguatan kesiswaan melalui program murid menjadi aspek penting yang mendukung pengembangan *soft skills* dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pendidikan.

Analisis terhadap program murid secara nasional menjadi krusial untuk mengevaluasi peran siswa dalam penguatan kesiswaan serta mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi di SMK seluruh Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program murid dalam mendukung penguatan kesiswaan SMK se-Indonesia serta mengkaji faktor pendukung dan penghambatnya

2. Metode

Penelitian ini dilakukan selama 3 hari dari tanggal 30 Juni – 2 Juli 2025 secara intensif dengan mengumpulkan subjek penelitian di satu hotel di Bekasi, Indonesia. Subjek penelitian ini adalah Wakil Kepala Sekolah (Wakasek) bidang kesiswaan seluruh Indonesia, dengan perwakilan setiap provinsinya seperti Gambar 1. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu *Ex Post Facto*, dan *Focus Group Discussion (FGD)*.

- a. **Ex Post Facto.** Penelitian ini menggunakan pendekatan *ex post facto* untuk menggali permasalahan yang ada terkait program murid dalam penguatan kesiswaan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Indonesia. Pendekatan *ex post facto* dipilih karena fenomena yang diteliti, seperti pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), penguatan pendidikan karakter,

implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, roadmap kalender akademik kesiswaan, serta pemetaan kompetensi dan bakat minat murid merupakan kondisi yang sudah berlangsung. Keterkaitan antara variabel bebas (misalnya jenis program murid, tingkat keterlibatan siswa) dan variabel terikat (penguatan kesiswaan) sudah melekat dalam kondisi nyata di lapangan.

Menurut Sukardi (2010), penelitian *ex post facto* adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan menguji hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang sudah terjadi tanpa adanya perlakuan atau manipulasi dari peneliti. Pada tahapan ini hanya digunakan untuk menentukan perumusan masalah yang berdasarkan hasil observasi yang telah dimiliki oleh para guru-guru kesiswaan seluruh Indonesia. Data permasalahan yang terkumpul merupakan fakta empiris yang sudah ada dan tidak mengalami intervensi. Pendekatan *ex post facto* pada penelitian ini untuk menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program murid dalam memperkuat kesiswaan, seperti karakteristik program, dukungan sekolah, dan partisipasi siswa. Pendekatan ini juga sesuai karena penguatan kesiswaan merupakan hasil interaksi berbagai variabel yang terjadi secara kompleks dan tidak dapat dikontrol secara eksperimental. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis hubungan dan pola yang muncul dari data lapangan yang sudah ada.

- b. **FGD (Focus Group Discussion).** Setelah tahap *Ex Post Facto* dilaksanakan guna menggali dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), langkah selanjutnya adalah pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan bersama. FGD merupakan metode kualitatif yang bersifat partisipatif, digunakan untuk menghimpun berbagai pandangan, klarifikasi, serta alternatif solusi dari para pemangku kepentingan (Pillsbury et al., 2021). FGD pada penelitian ini berfungsi sebagai wadah deliberatif yang memungkinkan keterlibatan aktif dari berbagai Wakil Kepala sekolah bidang kesiswaan (Wakasek) seluruh Indonesia. Tujuan melibatkan Wakasek Kesiswaan dimaksudkan untuk memperkaya perspektif dalam memahami permasalahan yang telah teridentifikasi melalui *Ex Post Facto* di sekolah masing-masing dan menjadi *sample* pada suatu daerah. Selain itu dalam FGD dapat sekaligus membangun kesepahaman atas langkah-langkah yang perlu diambil secara kolektif.

Pelaksanaan FGD diawali dengan pemilihan partisipan secara purposif dan terbagi menjadi beberapa kelompok, yakni berdasarkan relevansi dan keterlibatan mereka terhadap isu yang akan dibahas. Diskusi setiap kelompok difasilitasi oleh seorang moderator yang bertugas menjaga fokus, mengatur dinamika kelompok, serta memastikan bahwa seluruh peserta memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangan. Materi diskusi disusun berdasarkan hasil temuan dari *Ex Post Facto*, dan dijadikan dasar dalam merumuskan isu-isu utama yang perlu dikaji secara mendalam. Sepanjang proses diskusi, peserta didorong untuk mengklarifikasi berbagai temuan awal, memberikan interpretasi berdasarkan pengalaman nyata, serta menyusun alternatif solusi yang bersifat realistis dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Data yang diperoleh dari FGD didokumentasikan secara sistematis, baik melalui pencatatan maupun perekaman, kemudian dianalisis secara tematik. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran, kecenderungan opini, serta titik temu dalam perumusan solusi bersama. Hasil diskusi dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang disepakati secara kolektif oleh seluruh pemangku kepentingan yaitu seluruh Wakasek Kesiswaan seluruh Indonesia. FGD pada penelitian ini tidak hanya menjadi metode penggalian informasi, tetapi juga menjadi ruang konstruktif untuk membangun komitmen bersama dalam menyelesaikan permasalahan secara berkelanjutan (Verma, Raut, Narula, & Rao, 2024). Integrasi antara *Ex Post Facto* dan FGD memberikan landasan yang kuat bagi penyusunan strategi penanganan masalah di SMK secara tepat, partisipatif, dan berbasis bukti.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan dua tahapan penting yang sangat menentukan kualitas proses pendidikan sejak awal. Namun, dalam implementasinya, berbagai permasalahan masih ditemukan yang berdampak pada efektivitas kedua program tersebut. Identifikasi masalah yang muncul pada SPMB antara lain

terkait dengan sosialisasi yang belum optimal, keterbatasan akses teknologi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta belum tersedianya sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana (sarpras) yang memadai untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mendaftar ke SMK. Selain itu, keterlambatan distribusi petunjuk teknis (juknis) di beberapa daerah menyebabkan hambatan administratif, sementara kekhawatiran akan terjadinya bullying terhadap ABK yang diterima di SMK masih menjadi isu sensitif yang membutuhkan perhatian khusus.

Pada sisi lain, pelaksanaan MPLS juga menghadapi tantangan tersendiri. Salah satunya adalah keterlambatan penyebaran pedoman pelaksanaan MPLS yang menyebabkan sekolah tidak dapat melakukan persiapan secara optimal. Durasi pelaksanaan MPLS yang dinilai terlalu singkat berdampak pada kurang maksimalnya penyampaian materi kepada peserta didik baru. Selain itu, materi literasi dan numerasi yang seharusnya menjadi bagian wajib MPLS belum sepenuhnya terintegrasi dalam kurikulum pengenalan, sehingga siswa baru belum mendapatkan bekal dasar yang memadai untuk mengikuti proses pembelajaran di SMK.

Analisis kebutuhan menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas SPMB dan MPLS sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Untuk SPMB, peningkatan sosialisasi yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, baik melalui media daring maupun luring, sangat penting agar seluruh calon peserta didik dan orang tua memperoleh informasi yang jelas dan tepat waktu. Penambahan akses teknologi dan jaringan di wilayah 3T juga menjadi prioritas agar tidak ada siswa yang terhambat dalam proses pendaftaran. Bagi ABK, perlu adanya upaya penguatan kerjasama lintas sektor untuk mengarahkan mereka ke sekolah khusus yang lebih siap secara SDM dan sarpras, namun tetap menjamin hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang inklusif. Kerjasama dengan dinas terkait juga harus diperkuat guna mempercepat distribusi juknis, serta sosialisasi anti-bullying harus diintensifkan kepada seluruh warga sekolah.

Dalam konteks MPLS, percepatan penyebaran pedoman pelaksanaan menjadi sangat krusial agar sekolah dapat mempersiapkan kegiatan dengan baik. Penyesuaian durasi pelaksanaan MPLS minimal lima jam per hari diperlukan agar materi dapat disampaikan secara komprehensif dan peserta didik baru memperoleh pengalaman yang utuh dalam mengenal lingkungan sekolah. Penambahan materi literasi dan numerasi dalam MPLS juga harus menjadi perhatian utama sebagai bekal awal siswa dalam mengikuti pembelajaran di SMK.

Praktik baik yang telah diterapkan antara lain keberadaan posko layanan pengaduan SPMB yang mudah diakses masyarakat, penerapan pendaftaran daring yang meningkatkan kecepatan dan transparansi proses seleksi, serta pemetaan bakat dan minat sebelum penjurusan yang memudahkan siswa menentukan jurusan sesuai potensi. Proses silang posko verifikator antara SMK dan SMA juga menjadi langkah preventif terhadap potensi praktik KKN. Dalam pelaksanaan MPLS, penambahan materi dan perubahan durasi menjadi lima hari pelaksanaan memberikan waktu yang cukup untuk mengenalkan lingkungan sekolah secara menyeluruh kepada siswa baru. Materi MPLS yang telah disesuaikan dengan kebutuhan murid baru, serta kesempatan bagi siswa baru untuk menyaksikan langsung demo ekstrakurikuler dari kakak kelas, memberikan pengalaman yang lebih kaya dan membangun motivasi.

Sebagai rekomendasi, Direktorat SMK dapat melaksanakan program konkret seperti menghadirkan Wakasek Kesiswaan dalam kegiatan sosialisasi pra-SPMB dan pra-MPLS selama empat hari untuk memastikan seluruh informasi tersampaikan dengan baik. Selain itu, perlu adanya keseragaman program kerja kesiswaan secara nasional dan pembentukan Forum Wakasek Kesiswaan SMK Nasional secara legal sebagai wadah koordinasi, berbagi praktik baik, dan advokasi kebijakan di tingkat nasional. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan SPMB dan MPLS di SMK akan semakin efektif, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan serta tantangan di lapangan.

Pelaksanaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan di SMK menjadi aspek krusial dalam mendukung perkembangan karakter dan prestasi akademik siswa. Namun, sejumlah permasalahan masih ditemukan dalam penguatan pendidikan karakter, implementasi 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), pelaksanaan pertemuan pagi ceria, serta pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dalam penguatan pendidikan karakter, guru-guru belum sepenuhnya terlatih dalam program ini sehingga implementasinya belum optimal. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial dan media digital negatif turut menghambat pembentukan karakter positif. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mendukung

pendidikan karakter juga masih rendah, sementara fasilitas sekolah yang mendukung pelaksanaan program ini belum memadai.

Implementasi 7KAIH menghadapi berbagai kendala, seperti kebiasaan bangun pagi yang terganggu oleh pola tidur tidak teratur, kecanduan bermain game, dan aktivitas yang melelahkan. Aspek beribadah juga dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan kesadaran diri siswa, sedangkan olahraga terhambat oleh rasa malas, kurangnya fasilitas, dan pengaruh penggunaan ponsel. Kebiasaan makan sehat dan bergizi masih rendah akibat minimnya edukasi dari orang tua, dominasi makanan cepat saji di kantin sekolah, serta pengaruh iklan dan faktor ekonomi. Motivasi belajar siswa juga menurun karena kurangnya teladan dari guru dan orang tua, lingkungan pergaulan yang kurang mendukung, serta metode pembelajaran yang membosankan. Faktor-faktor ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk membangun kebiasaan positif secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pertemuan pagi ceria yang meliputi senam Anak Indonesia Hebat, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berdoa juga belum optimal. Keterlibatan siswa dalam senam masih kurang, dan pelaksanaannya berbeda antara sekolah besar dan kecil. Kesadaran nasionalisme saat menyanyikan lagu kebangsaan juga belum merata, sementara pelaksanaan doa masih terganggu oleh kurangnya khusyuk dan gangguan antar siswa. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian pelaksanaan yang lebih fleksibel dan pendekatan yang mampu meningkatkan antusiasme siswa secara efektif.

Pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan menjadi perhatian serius. Bentuk kekerasan yang ditemukan meliputi fisik, psikis, perundungan (bullying), cyber bullying, dan kekerasan seksual. Kondisi ini menuntut pengembangan program pencegahan yang sistematis, peningkatan kesadaran seluruh warga sekolah, serta kerja sama dengan pihak berwenang untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban. Pembentukan tim penanganan kekerasan dan prosedur yang jelas menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar aman dan nyaman bagi siswa.

Refleksi terhadap kebutuhan pelaksanaan lingkungan belajar yang kondusif menegaskan pentingnya pelatihan dan bimbingan bagi guru dalam program pendidikan karakter, edukasi literasi digital, serta pembinaan sikap yang melibatkan kontrol pemerintah dan komunikasi aktif dengan orang tua dan masyarakat. Penggunaan aplikasi digital berbasis sistem poin siswa dapat menjadi inovasi untuk memantau perkembangan karakter siswa secara lebih terstruktur. Konsistensi dalam pengisian catatan harian terkait 7KAIH juga diperlukan untuk mengontrol dan membiasakan kebiasaan positif pada siswa.

Praktik baik yang telah dijalankan mencakup in-house training dan workshop rutin bagi guru dan tenaga kependidikan tentang strategi pembelajaran berbasis karakter, kampanye bijak bermedsos, program mentoring antar siswa, serta kegiatan family gathering dan parenting day untuk memperkuat nilai-nilai karakter di keluarga dan masyarakat. Dalam implementasi 7KAIH, sekolah telah menerapkan jurnal bangun pagi, olahraga terjadwal, sosialisasi makanan sehat, pojok literasi, serta kegiatan bermasyarakat yang melibatkan orang tua dan komunitas sekitar. Pertemuan pagi ceria dilakukan secara fleksibel, dengan senam dilaksanakan di kelas oleh guru PJOK, menyanyikan lagu kebangsaan di kelas pada jam pelajaran pertama, dan doa yang dipimpin secara bergantian oleh siswa. Untuk pencegahan kekerasan, pengembangan program pencegahan, peningkatan kesadaran, dan kerja sama dengan pihak berwenang menjadi fokus utama.

Usulan konkret bagi Direktorat SMK mencakup pelaksanaan in-house training dan retreat bagi guru tentang pembelajaran berbasis karakter, pembatasan penggunaan media sosial bagi pelajar, pelatihan parenting day bagi orang tua dan tokoh masyarakat, serta penyediaan pedoman fasilitas sekolah yang memadai. Penguatan infrastruktur dan sarana untuk pemantauan digital 7KAIH, sosialisasi intensif, integrasi program dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, serta pemberian insentif dan apresiasi diharapkan dapat menjadikan 7KAIH sebagai budaya sekolah yang melekat. Pelaksanaan pertemuan pagi ceria disarankan dilakukan secara fleksibel menyesuaikan kapasitas sekolah, sedangkan pencegahan kekerasan memerlukan pembentukan tim penanganan, prosedur yang jelas, dukungan korban, pelatihan, serta kerja sama dengan pihak berwenang. Program pendukung seperti ekstrakurikuler, pengawasan sekolah, sistem pelaporan, dan evaluasi berkala juga sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan bagi seluruh siswa SMK.

Roadmap Kalender Akademik Kesiswaan

Penyusunan roadmap kalender akademik kesiswaan menghadapi berbagai tantangan yang berbeda di tiap jenjang kelas dan membutuhkan perhatian khusus. Di tingkat kelas 10, murid masih kesulitan mengenali lingkungan sekolah, budaya, aturan, serta potensi diri mereka, sementara kesalahpahaman antara sekolah dan orang tua juga kerap muncul. Selanjutnya, di kelas 11, masalah bergeser pada rendahnya etos kerja dan kompetensi siswa, yang diperparah dengan adanya bullying dan keterbatasan fasilitas pendukung seperti guru BK. Di kelas 12, tantangan yang muncul adalah kurang optimalnya coaching dan peer teaching, rendahnya kesiapan kebermanjaan, serta minimnya jiwa kewirausahaan dan pola pikir berkembang, sehingga membutuhkan solusi yang menyeluruh dan terintegrasi.

Roadmap perlu disusun berdasarkan analisis kebutuhan murid di setiap tingkat kelas. Di kelas 10, fokus utama adalah memfasilitasi adaptasi murid melalui Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), kontrak belajar, serta penguatan budaya kerja dan karakter agar murid memiliki kesadaran dan motivasi yang kuat. Sementara itu, kelas 11 memerlukan penguatan karakter dan kompetensi yang lebih dalam, didukung oleh lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman agar murid siap menghadapi tantangan akademik dan sosial. Sedangkan di kelas 12, pengembangan kesiapan kerja, kecerdasan finansial, pola pikir growth mindset, dan strategi pencapaian sukses menjadi aspek penting agar lulusan mampu bersaing di dunia kerja maupun berwirausaha secara mandiri.

Pelaksanaan roadmap yang efektif menuntut praktik baik berupa koordinasi yang sistematis dan kerja sama berbagai pihak. Misalnya, di kelas 10, keberhasilan MPLS dan pengenalan diri dapat dicapai dengan dukungan petunjuk teknis yang jelas, kolaborasi dengan puskesmas, serta pengawasan ketat terhadap kontrak belajar yang melibatkan murid dan orang tua. Di kelas 11, kerja sama dengan dunia industri dalam pelaksanaan uji kompetensi dan pendidikan anti-bullying menjadi kunci pembentukan ekosistem belajar yang kondusif. Sedangkan di kelas 12, strategi coaching yang terstruktur dan pelatihan wawancara kerja serta kewirausahaan memberikan bekal yang kuat bagi murid untuk menghadapi dunia kerja. Pendekatan ini memastikan roadmap tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga pedoman yang aplikatif dan berdampak nyata.

Direktorat SMK perlu mengimplementasikan program-program konkret yang sesuai dengan kebutuhan tiap jenjang. Di kelas 10, program seperti pemetaan bakat minat, MPLS, kontrak belajar, serta sosialisasi budaya kerja dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman sangat penting. Di kelas 11, penguatan karakter, kompetensi, pembentukan ekosistem belajar yang menyenangkan, praktik kerja lapangan, dan layanan konseling harus menjadi fokus. Sementara itu, kelas 12 memerlukan pelaksanaan coaching, pelatihan soft skill dan hard skill, pembuatan portofolio digital, bursa kerja, dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi. Dengan langkah-langkah ini, roadmap kalender akademik kesiswaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan murid secara komprehensif untuk menghadapi tantangan masa depan.

Pemetaan Kompetensi dan Bakat minat murid

Pemetaan kompetensi dan bakat minat murid melalui gerakan kepanduan dan ekstrakurikuler saat ini menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu hambatan utama adalah menurunnya minat murid untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyalurkan potensi mereka. Selain itu, kurangnya tenaga pembina dan pelatih yang kompeten turut mengurangi efektivitas pengembangan bakat dan minat murid. Permasalahan pendanaan juga menjadi kendala penting, terutama karena keterbatasan fleksibilitas penggunaan dana BOS dan kebijakan pendidikan gratis yang membatasi alokasi dana untuk kegiatan non-akademik. Waktu pelaksanaan ekstrakurikuler yang terbatas, dukungan orang tua yang kurang optimal, serta sedikitnya kesempatan unjuk prestasi di ajang resmi turut menyulitkan perkembangan murid. Bahkan, penghapusan beberapa cabang lomba beregu di O2SN menambah tantangan bagi murid yang berminat pada bidang olahraga.

Beberapa sekolah telah menerapkan berbagai praktik yang terbukti efektif dalam meningkatkan pemetaan kompetensi dan bakat minat murid. Pembentukan satuan tugas khusus untuk mengidentifikasi bakat dan minat murid serta pelibatan aktif orang tua dalam mendukung kegiatan ekstrakurikuler mampu meningkatkan

partisipasi dan motivasi murid. Selain itu, pemenuhan sarana prasarana melalui penyewaan fasilitas eksternal dan pengajuan bantuan ke pihak sekolah memberikan kontribusi positif. Keterbatasan tenaga pembina berhasil diatasi dengan melibatkan alumni serta bekerja sama dengan instansi terkait sebagai pelatih atau pembina tambahan. Dari sisi pendanaan, penggalangan sumbangan sukarela, pemanfaatan dana internal sekolah, dan pencarian sponsor dari pihak ketiga memperluas sumber dana yang tersedia. Koordinasi yang baik dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan sarana prasarana memungkinkan pengaturan jadwal ekstrakurikuler secara lebih optimal. Sementara itu, penyelenggaraan kegiatan parenting dan gelar karya murid yang melibatkan orang tua dan masyarakat turut memperkuat dukungan sosial bagi pengembangan bakat dan minat murid.

Langkah-langkah tersebut dapat menjadi pijakan penting bagi Direktorat SMK untuk menginisiasi program-program strategis dalam meningkatkan pemetaan kompetensi dan bakat minat murid melalui gerakan kepanduan dan ekstrakurikuler. Penyelenggaraan event kepanduan dan ekstrakurikuler secara berjenjang akan meningkatkan motivasi dan memperluas partisipasi murid. Program sertifikasi bagi guru sebagai pembina pramuka dan ekstrakurikuler diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan secara profesional. Kerja sama dengan pihak eksternal dalam bentuk pelatihan dan workshop yang sesuai dengan minat murid dapat memperkaya kompetensi serta mendukung perkembangan bakat secara maksimal. Melalui pelaksanaan program-program ini, diharapkan tercipta ekosistem pembelajaran non-formal yang kondusif, sehingga kompetensi dan bakat minat murid dapat tumbuh dan berkembang secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Terdapat beberapa permasalahan dalam Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMK, seperti sosialisasi yang kurang optimal, keterbatasan akses teknologi di wilayah 3T, dan kurangnya sarana bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Keterlambatan distribusi pedoman dan durasi MPLS yang singkat juga menghambat persiapan dan penyampaian materi. Upaya perbaikan meliputi peningkatan sosialisasi, percepatan distribusi juknis, integrasi materi literasi dan numerasi, serta penguatan kerjasama lintas sektor. Rekomendasi strategis mencakup peran aktif Wakasek Kesiswaan dan pembentukan forum nasional untuk meningkatkan koordinasi dan kualitas pelaksanaan SPMB dan MPLS secara inklusif dan adaptif.

Pelaksanaan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan di SMK memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Permasalahan pada penguatan karakter, implementasi 7KAIH, pertemuan pagi ceria, serta pencegahan kekerasan menunjukkan perlunya pelatihan guru, edukasi digital, fasilitas pendukung, dan pengawasan berkelanjutan. Praktik baik seperti in-house training dan keterlibatan komunitas perlu diperluas. Usulan konkret berupa integrasi program, pemantauan digital, serta pembentukan tim pencegahan kekerasan penting untuk mewujudkan budaya sekolah yang positif dan berkelanjutan.

Penyusunan roadmap kalender akademik kesiswaan harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap tantangan dan kebutuhan murid di setiap jenjang kelas agar dapat mengakomodasi pengembangan karakter, kompetensi, dan kesiapan kerja secara efektif. Melalui implementasi program yang terstruktur mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, penguatan budaya kerja, hingga pembekalan soft skill dan kewirausahaan, diharapkan murid dapat beradaptasi dengan baik dan siap menghadapi dunia kerja maupun tantangan masa depan. Keberhasilan roadmap ini sangat bergantung pada koordinasi yang sinergis antara sekolah, orang tua, dunia industri, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif dan berkelanjutan.

5. Saran

Secara keseluruhan, peningkatan pemetaan kompetensi dan bakat minat murid melalui gerakan kepanduan dan ekstrakurikuler memerlukan perhatian yang menyeluruh terhadap berbagai tantangan yang ada, mulai dari keterbatasan sarana, SDM, pendanaan, hingga dukungan orang tua dan kesempatan unjuk prestasi. Berbagai praktik baik yang telah diterapkan di beberapa sekolah menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan, optimalisasi sumber daya, serta inovasi dalam pendanaan dan pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan minat dan partisipasi murid secara signifikan. Dengan dukungan program strategis dari Direktorat SMK, termasuk penyelenggaraan event berjenjang,

sertifikasi pembina, dan kerja sama dengan pihak eksternal, diharapkan pemetaan kompetensi dan bakat minat murid dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan potensi setiap murid.

Referensi

- Arifin, Z. (2022). Manajemen peserta didik sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan. *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 8(1), 71–89. <https://doi.org/10.26594/dirasat.v8i1.3025>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2024). Rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025–2045.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). Laporan pendidikan vokasi dan SMK tahun 2023. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2024). Rencana Strategis Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan 2025-2029. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
- Mutucertification. (2023, May 17). Menilik UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Indonesia. <https://mutucertification.com/uu-no-20-tahun-2003-sistem-pendidikan/>
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Pillsbury, M. K. M., et al. (2021). Human-centered implementation research: A new approach to develop and evaluate implementation strategies for strengthening referral networks for hypertension in western Kenya. *BMC Health Services Research*, 21(1), 910. <https://doi.org/10.1186/s12913-021-06930-2>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78). <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>
- Sukardi. (2010). Metodologi penelitian pendidikan. Bumi Aksara.
- Tull, A., & Kuk, L. (2023). New realities in the management of student affairs. *Routledge*. <https://doi.org/10.4324/9781003446149>
- Verma, S., Raut, S. K., Narula, R., & Rao, P. (2024). Sustainability and capability building in organizations: A focused group approach. *FIIB Business Review*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/23197145241269203>.